



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.224, 2012

PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-
Kerajaan Thailand. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 1 Juni 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2012 di Bangkok, Thailand, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, selanjutnya disebut "Para Pihak",

MENIMBANG hubungan bersahabat antara Para Pihak;

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan bersahabat mereka, berdasarkan asas timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Kerajaan Thailand untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal masuk.

2. Warga negara Kerajaan Thailand yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal masuk.

PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR

Jangka waktu paspor diplomatik dan dinas dari warga negara setiap Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

PASAL 3

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 4

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan oleh pihak imigrasi yang berwenang sebagai tempat-tempat pemeriksaan lalu lintas internasional, kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan yang mengatur keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan persyaratan hukum lainnya yang mengatur masuknya, perjalanan dan tinggalnya orang asing.

PASAL 5**PERUBAHAN HUKUM NASIONAL**

Para Pihak wajib segera memberitahukan satu sama lainnya secara tertulis, melalui saluran diplomatik mengenai perubahan pada perundang-undangan dan peraturan masing-masing yang mengatur masuk, tinggal dan keluarnya orang asing.

PASAL 6**HAK PIHAK BERWENANG**

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan Pihak lainnya ketika memasuki wilayahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masuk, tinggal dan keluarnya orang asing.
2. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang, yang diberikan pembebasan visa berdasarkan Persetujuan ini, apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki atau dicurigai dapat membahayakan ketentraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.

PASAL 7**PENUNDAAN**

Masing-masing Pihak dapat menunda sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik. Pihak lain wajib segera diberitahukan mengenai pengenalan, dan pengakhiran kebijakan-kebijakan dalam Pasal ini tidak lebih dari 15 (lima belas) hari melalui saluran diplomatik.

PASAL 8**CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN**

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada misi diplomatik atau pos konsuler di negara yang bersangkutan. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 9**PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

PASAL 10**PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Perubahan atau revisi tersebut akan mulai berlaku sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 Persetujuan ini, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 11**PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana dipersyaratkan oleh masing-masing perundang-undangan nasionalnya, telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain, melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

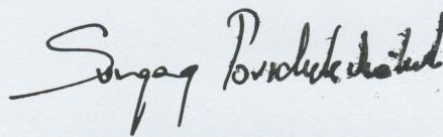
DIBUAT di Bangkok pada 1 Juni 2012, dalam dua rangkap, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



R.M. MARTY NATALEGAWA
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN THAILAND**



SURAPONG TOVICHAKCHAIKUL
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE
PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand, hereinafter referred to as "the Parties",

CONSIDERING the friendly relations between the Parties;

DESIRING to further strengthen their friendly relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of holders of diplomatic and official/service passports of the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

1. Nationals of the Republic of Indonesia who are holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Kingdom of Thailand for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of their entry.

2. Nationals of the Kingdom of Thailand who are holders of valid diplomatic or official passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of their entry.

ARTICLE 2

DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

The duration of diplomatic and official/service passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the other Party.

ARTICLE 3

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic or official/service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members who are holders of valid diplomatic or official/service passports, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

ARTICLE 4

ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Holders of valid diplomatic and official/service passports of either Party referred to in this Agreement, may enter into and depart from the territory of the other Party, at any point authorized by the competent immigration authorities as international passenger traffic checkpoints, except for those stipulated in the laws and regulations concerning security, migratory, customs, sanitary entry and other legal provisions governing the entry, travel and stay of foreigners.

ARTICLE 5**AMENDMENT OF NATIONAL LAW**

The Parties shall immediately inform each other in writing, through diplomatic channels about any changes in their respective laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.

ARTICLE 6**RIGHTS OF AUTHORITIES**

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into its territory, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.
2. The Parties reserve the rights to refuse admission of entry or shorten the stay of persons, entitled to visa exemption under this Agreement, who are considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

ARTICLE 7**SUSPENSION**

Either Party may temporarily suspend this Agreement, either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health. The other Party shall be duly informed of the introduction, as well as the termination of the measures stated in this paragraph no later than 15 (fifteen) days through diplomatic channels in advance.

ARTICLE 8**SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS**

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after the signing of this Agreement, the specimens of their valid diplomatic and official/service passports.
2. In case of introduction of new diplomatic or official/service passports, as well as, modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case of nationals of either Party lose or damage their diplomatic or official/service passports in the territory of the country of the other Party, they shall immediately inform their diplomatic mission or consular office in that country. The diplomatic mission or consular office shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality.

ARTICLE 9**DISPUTE SETTLEMENT**

Any differences or disputes arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 10**AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 11 of this Agreement, and form as an integral part of this Agreement.


ARTICLE 11**ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification through diplomatic channels that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to that effect.

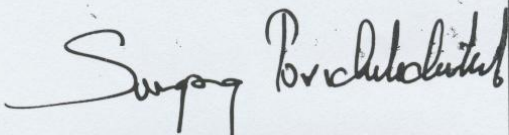
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Bangkok on this 1st June 2012, in duplicate, in the Indonesian, Thai and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA


R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT
OF THE KINGDOM OF THAILAND


SURAPONG TOVICHAKCHAIKUL
Minister of Foreign Affairs



REPUBLIK INDONESIA

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
"คู่ภาคี"

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างคู่ภาคี

ปรารถนาที่จะกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการประคับประคองต่างตอบแทน ด้วย
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศแต่ละฝ่ายของผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ
ราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและราชอาณาจักรไทย

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ของแต่ละประเทศ

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑

การยกเว้นการตรวจลงตรา

๑. คนชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่มีอายุใช้ได้
จะไม่จำเป็นต้องรับการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า แวะผ่าน และพำนักในดินแดนของ
ราชอาณาจักรไทย เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า

๒. คนชาติของราชอาณาจักรไทยที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่มีอายุใช้ได้ จะไม่
จำเป็นต้องรับการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า แวะผ่าน และพำนักในดินแดนของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า

ข้อ ๒

อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง

อายุการใช้งานของหนังสือเดินทางทูตและราชการของชาติของภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย ๖ (หก) เดือน ในวันที่เดินทางเข้าในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๓

การตรวจลงตราสำหรับสมาชิกในคณะผู้แทนทางทูตหรือสถานทำการกงสุล

คนชาติของภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่มีอายุใช้ได้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางทูตหรือสถานทำการกงสุลในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่มีอายุใช้ได้ต้องได้รับการตรวจลงตราการเดินทางเข้าที่เหมาะสมจากสถานเอกอัครราชทูตของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนการเดินทางเข้า

ข้อ ๔

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออก

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการที่มีอายุใช้ได้ของภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามความตกลงฉบับนี้ สามารถเดินทางเข้าและออกจากดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ณ ด่านใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอำนาจว่าเป็นจุดตรวจสำหรับการสัญจรของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ยกเว้นผู้ที่ถูกระบุในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินทางเข้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การย้ายถิ่นฐาน ศุลกากร สุขอนามัย และบทบัญญัติทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับการเข้าเมือง การเดินทางและการพำนักของชาวต่างชาติ

ข้อ ๕

การแก้ไขกฎหมายภายใน

คู่ภาคีจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีผ่านช่องทางการทูตถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง การพำนัก และการเดินทางออกของชาวต่างชาติ

ข้อ ๖

สิทธิของเจ้าหน้าที่

๑. ความตกลงฉบับนี้ไม่ได้ยกเว้นคนชาติของภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากพันธกรณีในการเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเดินทางเข้าในดินแดนของภาคีนั้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง การพำนักร และการเดินทางออกของชาวต่างชาติ

๒. คู่ภาคีสถวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าเมืองหรือลดระยะเวลาการพำนักของบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่พึงปรารถนาหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นภัยต่อความสงบสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสาธารณสุขหรือความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อ ๗

การระงับใช้

ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะระงับการใช้ความตกลงฉบับนี้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน ด้วยเหตุผลในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการสาธารณสุข ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งต้องได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงการเริ่มมาตรการการระงับใช้ และการสิ้นสุดมาตรการในวโรกาสนี้ ไม่ช้ากว่า ๑๕ (สิบห้า) วันผ่านช่องทางการทูต

ข้อ ๘

ตัวอย่างและการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทาง

๑. คู่ภาคีจะแลกเปลี่ยนตัวอย่างของหนังสือเดินทางทูตและราชการที่ใช้อยู่ของตน ผ่านช่องทางการทูต ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน หลังจากการลงนามความตกลงฉบับนี้

๒. ในกรณีที่มีการนำหนังสือเดินทางทูตหรือราชการใหม่มาใช้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทางที่ใช้อยู่ คู่ภาคีจะต้องแจ้งให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านช่องทางการทูต ๓๐ (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่นำออกใช้อย่างเป็นทางการ

๓. ในกรณีที่คนชาติของภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำหนังสือเดินทางทูตหรือราชการของตนสูญหายหรือเสียหายในดินแดนประเทศของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง บุคคลนั้นจะต้องแจ้งคณะผู้แทนทางทูตหรือสถานทำการกงสุลของตนในประเทศนั้น คณะผู้แทนทางทูตหรือสถานทำการกงสุลจะต้องออกเอกสารเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศที่บุคคลนั้นมีสัญชาติให้กับบุคคลดังกล่าว โดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศของบุคคลดังกล่าว

ข้อ ๙

การระงับข้อพิพาท

ความแตกต่างหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตีความ หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ จะต้องได้รับการระงับอย่างฉันทมิตรด้วยการปรึกษาหารือหรือการเจรจาระหว่างคู่ภาคี

ข้อ ๑๐

การแก้ไข

ความตกลงฉบับนี้อาจมีการแก้ไขหรือทบทวนได้ หากเห็นว่าเป็น ด้วยความยินยอมร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่ภาคี การแก้ไขหรือทบทวนดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับตามบทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อ ๑๑ ของความตกลงฉบับนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้

ข้อ ๑๑

การมีผลใช้บังคับ ระยะเวลา และการสิ้นสุด

๑. ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ ๓๐ (สามสิบ) วัน จากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสุดท้ายผ่านช่องทางการทูต ว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้วตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของแต่ละฝ่าย
๒. ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตัดสินใจบอกเลิกความตกลงฉบับนี้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังภาคีอีกฝ่ายหนึ่งผ่านช่องทางการทูต ๓๐ (สามสิบ) วัน ก่อนการบอกเลิสดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้าย ซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละฝ่าย

ได้ลงนามความตกลงฉบับนี้

ทำเป็นคู่ฉบับ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒ เป็นภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกต่างในการตีความ
ให้ใช้ตัวบทภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

สำหรับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(อาร์เอ็ม.มาร์ตี เอ็ม. นาดาเลกาวา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ

สำหรับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

(สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ